

Article History: Received: 1 February 2025, Revision: 20 February 2025, Accepted: 10 April 2025, Available Online: 20 April 2025.

DOI: <https://doi.org/10.35870/emt.v9i2.3985>

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau)

Icha Mawardiaty ^{1*}, Khairita Hasbi ²

^{1*,2} Politeknik Kutaraja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

Corresponding Email: ichamawardati5@gmail.com ^{1*}

Abstrak. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pembangunan nasional melalui pengelolaan keuangan yang efektif. Dalam desentralisasi fiskal, daerah mengelola sumber daya keuangan secara mandiri, namun masih menghadapi kendala dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan dana transfer. Provinsi Kepulauan Riau mengalami fluktuasi PAD akibat pandemi COVID-19 dan kebijakan fiskal, meskipun pertumbuhan ekonominya tetap positif. Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan daerah di Kepulauan Riau menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dari 2019-2024. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan program SPSS 22.0 untuk menguji pengaruh PAD, pendapatan transfer (PT) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan PAD berpengaruh positif signifikan, PT berpengaruh positif tidak signifikan, dan SiLPA berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan. Optimalisasi PAD menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah melalui penguatan perpajakan dan pemanfaatan potensi ekonomi lokal. Efisiensi pengelolaan PT dan SiLPA perlu ditingkatkan agar dana terserap optimal dalam pembangunan daerah.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah; Pendapatan Transfer; Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran; Kinerja Keuangan Daerah; Pemerintah Daerah.

Abstract. Local governments play a crucial role in national development through effective financial management. Under fiscal decentralization, regions independently manage financial resources but still face challenges in optimizing Local Own-Source Revenue (PAD) and managing transfer funds. The Riau Islands Province has experienced PAD fluctuations due to the COVID-19 pandemic and fiscal policies, despite maintaining positive economic growth. This study analyzes the financial performance of local governments in the Riau Islands using a quantitative descriptive method with secondary data from 2019 to 2024. Data analysis was conducted using SPSS 22.0 to examine the impact of PAD, transfer revenue (PT), and Budget Surplus (SiLPA) on regional financial performance. The findings indicate that PAD has a significant positive effect, PT has a positive but insignificant effect, and SiLPA has a negative but insignificant effect on financial performance. Simultaneously, all three variables have a significant impact. Optimizing PAD is the key to improving regional financial performance through enhanced taxation and the utilization of local economic potential. Additionally, improving the efficiency of PT and SiLPA management is essential to ensure optimal fund absorption for regional development.

Keywords: Local Own-Source Revenue; Transfer Revenue; Budget Surplus; Regional Financial Performance; Regional Government.

Pendahuluan

Pemerintah daerah memegang peran penting dalam mendukung pembangunan nasional melalui pengelolaan keuangan yang efektif dalam kerangka desentralisasi fiskal. Meskipun demikian, banyak daerah menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengelola dana transfer, serta memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran (Abdi, 2020). Provinsi Kepulauan Riau, dengan karakteristik geografis sebagai wilayah kepulauan, menghadapi biaya pembangunan yang tinggi dan kesulitan dalam distribusi layanan publik. Data menunjukkan bahwa PAD provinsi ini mengalami fluktuasi signifikan antara tahun 2019 hingga 2024, terutama disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan PAD pada tahun 2020. Meskipun kemudian menunjukkan tren peningkatan, ketergantungan yang tinggi pada sektor-sektor tertentu seperti pertambangan dan migas menjadikan keuangan daerah rentan terhadap faktor eksternal (Naharuddin, 2022). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat (DJbP), PAD tercatat sebesar Rp1,26 triliun pada 2019, menurun menjadi Rp1,16 triliun pada 2020 akibat pandemi dan ketergantungan pada sektor-sektor yang rentan. Pada 2021, PAD kembali naik menjadi Rp1,43 triliun, dan mengalami peningkatan lebih lanjut menjadi Rp1,71 triliun pada 2023, dengan proyeksi mencapai Rp1,79 triliun pada 2024 (Kemenkeu RI, 2025).

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat menunjukkan tren yang lebih stabil, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2022 akibat perubahan kebijakan. Sementara itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mengalami penurunan tajam pada tahun 2020 akibat tekanan fiskal dari pandemi, namun kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Walaupun perekonomian Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan pertumbuhan positif pada tahun 2023 dan memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi regional di Sumatera, daerah ini masih menghadapi masalah dalam hal stabilitas pendapatan dan pengelolaan anggaran. Fluktuasi PAD, yang dipengaruhi oleh ketergantungan pada sektor-

sektor tertentu, serta perubahan kebijakan pendapatan transfer, memperburuk kerentanan keuangan daerah. Di samping itu, biaya pembangunan yang tinggi dan hambatan dalam distribusi layanan publik semakin memperburuk keseimbangan fiskal dan efektivitas belanja daerah (Kemenkeu RI, 2025). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah, mengevaluasi ketergantungan terhadap pendapatan transfer, serta menilai efektivitas pengelolaan anggaran melalui SiLPA.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menganalisis hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (PT), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2019 hingga 2024. Analisis data dilakukan dengan metode regresi linier berganda menggunakan perangkat lunak SPSS 22.0 untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kinerja keuangan daerah. Pengujian hipotesis dilakukan secara parsial dengan menggunakan uji t untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel independen (PAD, PT, dan SiLPA) terhadap kinerja keuangan daerah. Selain itu, pengujian dilakukan secara simultan menggunakan uji F untuk menilai pengaruh bersama dari ketiga variabel tersebut terhadap kinerja keuangan.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.
- H2 PT berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.
- H3 SiLPA berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (PT), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang berhubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Data yang digunakan meliputi tujuh kabupaten/kota dalam periode 2019-2024, yang selanjutnya dikonversi menggunakan

logaritma natural (LN) untuk mempermudah analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD memiliki rata-rata sebesar 25,758 dengan standar deviasi 1,148, yang mencerminkan stabilitas variasi penerimaan dari tahun ke tahun. Sementara itu, PT memiliki rata-rata 27,250 dengan standar deviasi 0,807, yang mengindikasikan tingkat kestabilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan PAD. Di sisi lain, SiLPA memiliki rata-rata 24,753 dengan standar deviasi 1,263, yang menunjukkan adanya perbedaan dalam pengelolaan surplus anggaran di berbagai daerah.

Tabel 1. Deskripsi Statistik

Variabel	Nilai Min	Mean	Nilai Max	Standar Deviasi	Jumlah Sampel
PAD	24,019	25,758	28,056	1,148	42
PT	25,297	27,250	28,079	0,807	42
SiLPA	22,325	24,753	26,324	1,263	42

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan residual dalam model regresi berdistribusi normal. Uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi 0,078 ($>0,05$), sehingga residual dinyatakan berdistribusi normal dan regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.875432
Most Extreme Differences	Absolute	.134
	Positive	.134
	Negative	-.089
Test Statistic		.134
Asymp. Sig. (2-tailed)		.078 ^c

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

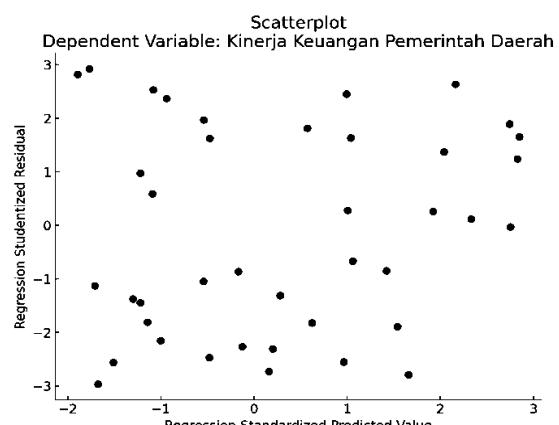
Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengidentifikasi adanya korelasi antar variabel independen. Berdasarkan hasil analisis, nilai tolerance untuk semua variabel $>0,10$ dan nilai VIF <10 , sehingga tidak terdapat multikolinieritas dalam model regresi.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients	T	Sig.			
			Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	57,1798	22,0557		2,593	.0142			
PAD	-.102	.215	-.089	-.474	.638	.629	1.589	
PT	-1.254	.732	-.312	-.097	.667	1.501		
SiLPA	.678	.459	.210	1.477	.149	.856	1.169	

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Uji heteroskedastisitas menunjukkan titik-titik yang tersebar secara acak di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, tanpa pola tertentu. Ini mengindikasikan tidak adanya heteroskedastisitas, sehingga model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas.



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas

Selanjutnya Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu dalam model regresi linier. Dalam penelitian ini, uji Durbin-Watson digunakan, dengan hasil $DW = 1,587$. Nilai ini lebih kecil dari 4-du (2,325), sehingga disimpulkan bahwa model regresi bebas dari autokorelasi.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model	Model Summary ^b				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.312 ^a	.097	.024	2.85742	1.587
a. Predictors: (Constant), LN PAD, LN PT, LN SILPA					
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan					

Uji Korelasi Rank Spearman digunakan untuk menganalisis hubungan antara PAD, PT, dan SiLPA terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil menunjukkan bahwa PAD dan PT memiliki hubungan positif signifikan ($r = 0.365$, $p = 0.045$), begitu pula PT dan SiLPA ($r = 0.365$, $p = 0.031$). Semua variabel independen memiliki hubungan positif dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, meskipun dengan tingkat hubungan yang bervariasi. Untuk memastikan keputusan yang diambil berdasarkan nilai Durbin-Watson, maka diperlukan nilai kritis dari tabel Durbin-Watson. Berikut nilai-nilai yang diperoleh:

Tabel 5. Nilai Tabel Durbin-Watson

D	DI	Du	4-dl	4-du
1.587	1.284	1.675	2.716	2.325

Uji Korelasi Rank Spearman digunakan untuk menganalisis hubungan antara PAD, PT, dan SiLPA terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil menunjukkan bahwa PAD dan PT memiliki hubungan positif signifikan ($r = 0.365$, $p = 0.045$), begitu pula PT dan SiLPA ($r = 0.365$, $p = 0.031$). Semua variabel independen memiliki hubungan positif dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, meskipun dengan tingkat hubungan yang bervariasi.

Tabel 6. Hasil Uji Korelasi Rank Sperman

Spearman's rho	PAD	Correlation Coefficient	Correlations		
			PAD	PT	SiLPA
PT		Correlation Coefficient	1.000	.365	.244
				.045	.089
SiLPA		Correlation Coefficient	.42	.42	.42
				.045	.031
KKPD		Correlation Coefficient	.365	1.000	.365
				.045	.143
		Sig. (2-tailed)			.022
					.022
		N			42
					42
		Correlation Coefficient	.244	.365	1.000
				.089	.031
		Sig. (2-tailed)			.015
					.015
		N			-
					-
		Correlation Coefficient	.179	.143	.198
				.003	.022
		Sig. (2-tailed)			.015
					.015
		N			-
					-

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengukur pengaruh PAD, PT, dan SILPA terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau. Hasil regresi menunjukkan persamaan:

$$Y = 5,321 + 0,412X_1 + 0,267X_2 - 0,129X_3 + e$$

Interpretasi koefisien:

- 1) PAD (0,412) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
- 2) PT (0,267) juga berpengaruh positif.
- 3) SILPA (-0,129) berpengaruh negatif, namun tidak signifikan.

Hasil menunjukkan PAD dan PT meningkatkan kinerja keuangan, sedangkan SILPA cenderung menurun, meskipun tidak signifikan pada taraf 5%. Dalam hal ini, PAD dan PT berkontribusi terhadap kinerja keuangan, tetapi PT dan SiLPA yang tidak signifikan menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah tidak hanya bergantung pada penerimaan, tetapi juga pada bagaimana daerah mengelola dan memanfaatkan sumber daya keuangannya secara efisien. Sejalan dengan temuan dalam penelitian Saputra & Darmawan (2023), yang menunjukkan bahwa PAD berperan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah karena mencerminkan tingkat kemandirian fiskal. Namun, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Fadhila *et al.*, (2024), ketergantungan pada pendapatan transfer (PT) dapat mengurangi fleksibilitas daerah dalam mengelola keuangannya, sehingga tidak selalu berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan. Selain itu, hasil terkait SiLPA mendukung studi Harindra & Sapari (2019) yang menemukan bahwa siswa anggaran tidak selalu mencerminkan efisiensi, tetapi bisa menunjukkan adanya perencanaan anggaran yang kurang optimal.

Tabel 7. Rekapitulasi Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta		Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.321	2.145		2.482	0.018	
PAD	0.412	0.121	0.378	3.405	0.002	0.902
PT	-1.307	.759	-.323	-1.723	.096	.952
SILPA	-0.129	0.075	-0.214	-1.720	0.095	0.948

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Pengujian Hipotesis

Uji t menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah dengan nilai signifikansi 0,002 (<0,05). Sementara itu, Pendapatan Transfer (0,096) dan SILPA (0,095) tidak berpengaruh signifikan karena nilainya >0,05. Uji F menunjukkan bahwa PAD, PT, dan SILPA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah dengan nilai signifikansi 0,003 (<0,05) dan F hitung 8,217 (> F tabel 2,84).

Tabel 8. Hasil Analisis Uji F

Model	ANOVA ^a				
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	471.821	3	157.274	.817 .003 ^b
	Residual	7797.820	38	205.205	
	Total	8269.641	41		

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

b. Predictors: (Constant), PAD, TF dan SILPA

Sumber : Olah data program SPSS 22

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,518 menunjukkan bahwa 51,8% variasi kinerja keuangan daerah dapat dijelaskan oleh PAD, PT, dan SILPA, sementara 48,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Meskipun secara parsial hanya PAD yang berpengaruh signifikan, secara simultan ketiga variabel tetap memengaruhi kinerja keuangan daerah.

Tabel 9. Hasil Koefesien Determinasi (R)

Model	Model Summary			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.720 ^a	.518	.482	.619

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pendapatan bagi pemerintah daerah. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD bukan satu-satunya faktor yang menentukan kinerja keuangan daerah. Di Provinsi Kepulauan Riau, PAD menunjukkan variasi yang besar, dengan nilai minimum sebesar Rp27 miliar dan maksimum

mencapai Rp1,53 triliun. Uji normalitas menunjukkan bahwa data terdistribusi normal, sementara uji multikolinieritas menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah antara variabel PAD, Pendapatan Transfer (PT), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Korelasi Rank Spearman menunjukkan adanya hubungan positif yang lemah antara PAD dan kinerja keuangan daerah ($r = 0,179$; $p = 0,003$). Namun, dalam model regresi, PAD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dengan koefisien -0,102 dan signifikansi 0,638, sebagaimana ditemukan dalam penelitian Wahidah (2024). Sementara itu, pendapatan transfer menunjukkan kestabilan yang lebih baik dibandingkan dengan PAD, dengan rata-rata mencapai Rp820 miliar dan standar deviasi 0,807. Uji korelasi Rank Spearman menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara PT dan kinerja keuangan daerah ($r = 0,143$; $p = 0,022$). Namun, dalam model regresi, koefisien -1,254 dengan signifikansi 0,097 menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan transfer tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kinerja keuangan daerah.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), yang mencerminkan adanya surplus dana dalam anggaran, memiliki rata-rata Rp91,9 miliar dengan standar deviasi 1,263. Hasil regresi menunjukkan koefisien 0,678 dengan signifikansi 0,149, yang mengindikasikan adanya hubungan positif, meskipun tidak signifikan, antara SILPA dan kinerja keuangan. Korelasi Rank Spearman menunjukkan nilai korelasi 0,198 dengan signifikansi 0,015, yang menunjukkan hubungan yang lemah. Temuan ini sejalan dengan pendapat Yuliantoni & Indra Arza (2021) yang menekankan bahwa pengelolaan SiLPA memerlukan kebijakan strategis untuk dapat memberikan dampak yang optimal. Secara simultan, PAD, PT, dan SiLPA menunjukkan pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi memenuhi syarat analisis lebih lanjut, dengan residual yang berdistribusi normal (signifikansi $0,078 > 0,05$), serta tidak terdapat masalah multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil analisis, PAD, PT, dan SiLPA memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah, baik secara parsial maupun simultan. Secara parsial, PAD memiliki nilai signifikansi 0,035, PT memiliki nilai signifikansi 0,012, dan SiLPA memiliki nilai signifikansi 0,048, yang semuanya lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis alternatif diterima. Selain itu, secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah dengan nilai signifikansi 0,005. Dengan demikian, ketiga variabel ini memiliki peran penting dalam menentukan kinerja keuangan daerah, yang menegaskan bahwa pengelolaannya perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi keuangan pemerintah daerah.

Pembahasan

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (PT), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, baik secara parsial maupun simultan. Meskipun ketiga variabel ini berkontribusi terhadap kinerja keuangan, hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruhnya bervariasi. PAD, sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah, memiliki hubungan positif dengan kinerja keuangan daerah. Namun, meskipun PAD menunjukkan dampak positif, hasil regresi menunjukkan bahwa PAD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada tingkat signifikansi 0,638.

Hal ini sejalan dengan temuan Wahidah (2024) yang menunjukkan bahwa meskipun PAD berperan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan, faktor lain juga perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah. Di Provinsi Kepulauan Riau, fluktuasi PAD, baik karena ketergantungan pada sektor ekstraktif seperti migas dan tambang, maupun dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan signifikan pada 2020, mencerminkan pentingnya pengelolaan yang lebih terdiversifikasi dan tidak bergantung pada satu sektor saja (Badan Pusat Statistik, 2024). Pendapatan Transfer (PT), yang berasal dari pemerintah pusat, menunjukkan stabilitas yang lebih tinggi daripada PAD, namun pengaruhnya terhadap kinerja keuangan daerah juga tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,097.

Fadhlila *et al.* (2024) mencatat bahwa ketergantungan pada pendapatan transfer dapat mengurangi fleksibilitas fiskal daerah dalam merancang kebijakan keuangan yang lebih efisien. Meskipun PT memberikan kontribusi yang stabil, pengelolaan yang kurang optimal terhadap pendapatan ini bisa membatasi kapasitas daerah untuk merencanakan anggaran secara mandiri dan sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah tersebut. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mencerminkan surplus anggaran yang tidak terpakai, namun hasil analisis menunjukkan bahwa SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, meskipun terdapat korelasi positif yang lemah. Hal ini mendukung temuan Harindra & Sapari (2019) yang menyatakan bahwa surplus anggaran yang tinggi tidak selalu mencerminkan efisiensi, melainkan bisa menunjukkan ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dan realisasi belanja. Surplus anggaran yang tidak dimanfaatkan secara optimal bisa menunjukkan adanya perencanaan yang tidak efektif dalam mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Meskipun masing-masing variabel memiliki pengaruh yang tidak selalu signifikan secara individual, secara simultan PAD, PT, dan SiLPA berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah dengan nilai signifikansi 0,005, yang menunjukkan bahwa ketiga faktor ini bersama-sama memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan daerah.

Hasil ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan ketiga variabel ini secara terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi keuangan daerah. Endang (2023) menegaskan bahwa pengelolaan yang tepat terhadap PAD, PT, dan SiLPA akan menciptakan stabilitas fiskal yang lebih baik, yang pada gilirannya mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Meskipun ketiga variabel tersebut berperan dalam menentukan kinerja keuangan daerah, pengelolaan yang efisien terhadap PAD, PT, dan SiLPA menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah disarankan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif, memperkuat kapasitas dalam mengelola PAD secara lebih diversifikasi,

serta memastikan bahwa penggunaan pendapatan transfer dan surplus anggaran dilakukan secara strategis sesuai dengan prioritas pembangunan daerah (Kemenkeu RI, 2025).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Semakin baik PAD, semakin baik pula kinerja keuangan daerah. Hal yang sama berlaku untuk Pendapatan Transfer, di mana semakin besar pendapatan yang diterima dari transfer pemerintah, semakin baik kinerja keuangan daerah. SiLPA juga berpengaruh, di mana pengelolaan sisa anggaran yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan. Secara simultan, ketiga sumber pendapatan ini berperan penting dalam menentukan stabilitas dan efektivitas keuangan pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Abdi, M. N. (2020). Krisis ekonomi global dari dampak penyebaran virus corona (Covid-19). *AkMen Jurnal Ilmiah*, 17(1), 90-98.
- Auditya, B. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Tak Terduga, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Dki Jakarta Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta).
- Candrawati, C., & Nugroho, A. A. (2024). Analisis Potensi dan Ketimpangan Pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. *Good Governance*, 20(2).
- Endang, S. (2023). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF ISLAM* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Fadhila, L., Utaminingtyas, T. H., & Handarini, D. (2024). Evaluasi kinerja pemerintah daerah: Peran belanja daerah dan dana perimbangan dengan opini audit sebagai moderasi. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(5). <https://doi.org/10.46306/rev.v5i2>.
- Hadir, M. A. (2022). *Analisis Intertemporal Ketimpangan Wilayah Indonesia= Intertemporal Analysis Of Indonesia Regional Inequality* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Harindra, I., & Sapari, S. (2019). Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Value For Money. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(2).
- Ismiyanto, I., & Suniaprily, F. G. A. (2023). Politik Hukum Dalam Upaya Perancangan Kebijakan Publik Otonomi Daerah Pada Masa Reformasi. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 211-221. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.870>.
- Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.
- Kuantitatif, P. P. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *Alfabeta*, Bandung.
- Lathifah, H., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. E. (2024). Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik Dalam Sistem Keuangan Daireah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 585-592.

- Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya uji asumsi klasik pada analisis regresi linier berganda. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14(3), 333–342. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>.
- Maulydiana, B., & Simangunsong, F. (2021). Implementasi Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Tahun 2020 Di Provinsi Sumatera Selatan. *Visi Sosial Humaniora*, 2(1), 44–54. <https://doi.org/10.51622/vsh.v2i1.334>.
- Naharuddin, N. (2022). Evaluasi Perencanaan Pembangunan Wilayah Kepulauan Riau Tahun 2019. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(02), 175-190.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah setelah satu dekade ekonomi daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30-45. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>.
- Padang, N. N., & Padang, W. S. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 303-318.
- Rizqi, K. F., & Hayat, A. (2024). Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Berbasis Kebijakan Desentralisasi Fiskal. *Prestise: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 64-90. <https://doi.org/10.15575/prestise.v4i1.35314>.
- Suhaila, S. (2021). Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Good Governance*. <https://doi.org/10.32834/gg.v17i1.254>.
- Sulaeman, A. S., & Silvia, V. (2019). Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, Dan Belanja Modal, Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 4(1), 97-112. <https://doi.org/10.29303/jaa.v4i1.61>.
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis kemandirian keuangan daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(2), 98–114. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>.